

**DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: KOMET
Kecamatan: BANJARBARU UTARA
Kota: KOTA BANJARBARU
Provinsi: KALIMANTAN SELATAN
Bulan: 12
Tahun: 2021

Nama Pengisi: MOHAMAD RIFKI SAPUTRA

Pekerjaan: STAF KELURAHAN

Jabatan: TIDAK ADA JABATAN

Kepala Desa / Lurah: NOR AKBAR, S.Pi

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : RT RW KELURAHAN KOMET

Referensi 2: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARBARU

Referensi 3: DISDUKCAPIL KOTA BANJARBARU

Referensi 4: DATA - DATA TERDAHULU

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki
Jumlah penduduk tahun ini	
Jumlah penduduk tahun lalu	
Persentase perkembangan	

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	895 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	880 KK
Prosentase Perkembangan	1.7 %

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	2
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	9
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	0
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	8
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	6
---------------------------------	---

2. Jumlah keluarga sejahtera 1	C
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	C
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	C
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	C
6. Total jumlah kepala keluarga	C

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya
Jagung	0	0	0	0	
Cabe	0	0	0	0	
Bawang Merah	0	0	0	0	
Bawang putih	0	0	0	0	
Sawi	0	0	0	0	
Kentang	0	0	0	0	
Kubis	0	0	0	0	
Mentimun	0	0	0	0	
Buncis	0	0	0	0	
Kacang kedelai	0	0	0	0	
Brocoli	0	0	0	0	
Bayam	0	0	0	0	
Kangkung	0	0	0	0	
Kacang turis	0	0	0	0	
Kacang Hijau	0	0	0	0	
Selada	0	0	0	0	
Kacang tanah	0	0	0	0	
Kacang panjang	0	0	0	0	
Jeruk nipis	0	0	0	0	
Kacang merah	0	0	0	0	
Padi sawah	0	0	0	0	
Jamur	0	0	0	0	
Padi ladang	0	0	0	0	
Kemiri	0	0	0	0	

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Bia

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahar yg digu (R

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada

F. SUBSEKTOR KERAJINAN

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Total jenis kerajinan rumah tangga

G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**G.1. Subsektor Industri Pakaian**

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Total jumlah jenis industri tsb yang ada

G.2. Subsektor Industri Pangan

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Total jumlah jenis industri tsb yang ada

G.3. Industri Pengolahan Migas

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Total jumlah jenis industri tsb yang ada

G.4. Industri Pengolahan Non Migas

Total nilai produksi tahun ini
Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan
Total jumlah jenis industri tsb yang ada

H. SUBSEKTOR KEHUTANAN

Total nilai produksi tahun ini

Total nilai bahan baku yang digunakan
Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

I.1. Subsektor Perdagangan Besar

Total nilai transaksi
Total nilai aset perdagangan yang ada
Total jumlah jenis perdagangan besar
Total nilai biaya yang dikeluarkan
Total biaya antara lainnya

I.2. Subsektor Perdagangan Eceran

Jumlah total jenis perdagangan eceran
Total nilai transaksi
Total nilai biaya yang dikeluarkan
Total nilai aset perdagangan eceran

I.3. Subsektor Hotel

Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada
Jumlah total pendapatan
Jumlah total biaya pemeliharaan
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan
Jumlah total pendapatan yang diperoleh

I.4. Subsektor Restoran

Jumlah tempat penyediaan konsumsi
Biaya konsumsi yang dikeluarkan
Biaya antara lainnya
Jumlah total pendapatan yang diperoleh

J. Sektor Bangunan/Konstruksi

Jumlah bangunan yang ada tahun ini
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan
Total nilai bangunan yang ada
Biaya antara lainnya

K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

K.1. Subsektor Bank

Jumlah transaksi perbankan
Jumlah nilai transaksi perbankan
Jumlah biaya yang dikeluarkan

K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank

Jumlah lembaga keuangan bukan bank
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank
Biaya yang dikeluarkan

K.3. Subsektor Sewa Bangunan

Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah

Total nilai persewaan yang dicapai

Biaya yang dikeluarkan

Biaya lainnya

K.4. Subsektor Jasa Perusahaan

Jumlah perusahaan jasa

Nilai transaksi perusahaan jasa

Biaya yang dikeluarkan

Biaya lainnya

L. SEKTOR JASA-JASA**L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum**

Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan

L.2. Subsektor jasa swasta

Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat

Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial

Biaya yang dikeluarkan

L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi

Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi

Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi

Biaya antara yang dikeluarkan

L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga

Biaya antara yang dikeluarkan

M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI**M.1. Subsektor Angkutan**

Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, u sungai/danau/penyeberangan

Jumlah total kendaraan angkutan

Nilai total transaksi pengangkutan

Nilai total biaya yang dikeluarkan

N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM**N.1. Subsektor Listrik**

Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik
--

Jumlah nilai produksi listrik

Jumlah total nilai transaksi

Jumlah biaya antara yang dikeluarkan

N.2. Subsektor Gas

Jumlah kegiatan penyediaan gas

Nilai aset produksi gas

Nilai transaksi

Biaya antara yang dikeluarkan

N.3. Subsektor Air Minum

Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum

Nilai aset penyediaan air minum

Nilai produksi air minum

Nilai transaksi air minum

Biaya antara yang dikeluarkan

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga

Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja
--

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian

Petani	(
--------	---

Buruh Tani	(
------------	---

Pemilik Usaha Tani	(
--------------------	---

2. Sektor Perkebunan

Karyawan Perusahaan Perkebunan	(
--------------------------------	---

Buruh perkebunan	(
------------------	---

Pemilik usaha Perkebunan	(
--------------------------	---

3. Sektor Peternakan

Peternakan Perorangan	(
-----------------------	---

Buruh Usaha Peternakan	(
------------------------	---

Pemilik Usaha Peternakan	(
--------------------------	---

4. Sektor Perikanan

Nelayan	(
---------	---

Buruh Usaha Perikanan	(
-----------------------	---

Pemilik Usaha Perikanan	(
-------------------------	---

5. Sektor Kehutanan

Pengumpul Hasil Hutan

Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan

6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C

Penambang Galian C Perorangan

Buruh Usaha Pertambangan

Pemilik Usaha Pertambangan

7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga

Tukang batu

Tukang kayu

Tukang jahit

Tukang rias

8. Sektor Industri Menengah dan Besar

Karyawan perusahaan swasta

Karyawan perusahaan pemerintah

9. Sektor Perdagangan

Karyawan Perdagangan Hasil Bumi

Buruh Perdagangan Hasil Bumi

Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi

10. Sektor Jasa

Kontraktor

Pegawai Negeri Sipil

TNI

POLRI

Dokter swasta

Bidan swasta

Perawat swasta

Dosen swasta

Guru swasta

Pensiunan PNS

Pengacara

Notaris

Pembantu rumah tangga

Sopir

Wiraswasta lainnya

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT**A. ASET TANAH**

Tidak memiliki tanah

Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha

Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha
 Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha
 Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha
 Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha
 Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha
 Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha
 Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha
 Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha
 Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha
 memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha
 Memiliki tanah lebih dari 10 ha
 Jumlah total penduduk

B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM

C. ASET SARANA PRODUKSI

Memiliki penggilingan padi
 Memiliki traktor
 Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian
 Memiliki kapal penangkap ikan
 Memiliki alat pengolahan hasil perikanan
 Memiliki alat pengolahan hasil peternakan
 Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan
 Memiliki alat pengolahan hasil hutan
 Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan
 Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata
 Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan
 Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah
 Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas

D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING

RUMAH MENURUT LANTAI

RUMAH MENURUT ATAP

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	orang

Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	orang
Jumlah penduduk sedang D-1	orang
Jumlah penduduk tamat D-1	orang
Jumlah penduduk sedang D-2	orang
Jumlah penduduk tamat D-2	orang
Jumlah penduduk sedang D-3	orang
Jumlah penduduk tamat D-3	orang
Jumlah penduduk sedang S-1	orang
Jumlah penduduk tamat S-1	orang
Jumlah penduduk sedang S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-3	orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	orang
C. Rasio Guru dan Murid	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	orang
7. Jumlah guru SLTA/ sederajat	orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	orang
9. Jumlah siswa SLB	orang
10. Jumlah guru SLB	orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	unit
Jumlah perpustakaan keliling	unit
Jumlah sanggar belajar	unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	kelompok

Jumlah peserta ujian Paket C	orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil	12 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	1 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	12 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	2 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	10 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	3 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	13 orang
Jumlah ibu nifas	0 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	13 orang

B. Kualitas Bayi

Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	13 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	13 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang

C. Kualitas Persalinan

Tempat Persalinan

Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit

Pertolongan Persalinan

Jumlah Persalinan ditolong Dokter	11 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	2 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan

D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	34 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	31 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	34 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	31 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	34 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	28 orang
Jumlah bayi 9 bulan	34 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	34 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	624 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	369 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	220 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	74 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	21 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	19 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	101 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	5 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	84 orang
F. Wabah Penyakit	
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	1 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	67,64 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	72,10 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	71,28 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	70,20 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	455 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	766 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	776 Keluarga

6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	0 Keluarga

I. Perilaku hidup bersih dan sehat

Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	1.231 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	0 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	0 Keluarga

Pola makan

Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Tidak
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Tidak
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Tidak
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak

Kebiasaan berobat bila sakit

Dukun Terlatih	Tidak ada
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Banyak
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Tidak ada
Paranormal	Tidak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit
Tidak diobati	Tidak ada

J. Status Gizi Balita

Jumlah Balita	350 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	349 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	1 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

Jenis penyakit	Jumlah penderita
Jantung	66 orang
Paru-paru	17 orang
Stroke	24 orang
Diabetes Melitus	163 orang
Malaria	2 orang
Gila/stress	3 orang
TBC	28 orang
ISPA	713 orang
Asma	23 orang

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

Jumlah MCK Umum	1 unit
Jumlah Posyandu	1 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	8 ora
Jumlah pembina Posyandu	1 ora
Jumlah Dasawisma	0 Das
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	0 ora
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	0 ora
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	1 ora
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya	0 jeni
Jumlah kegiatan Posyandu	0 jeni
Jumlah kader kesehatan lainnya	0 ora
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jeni
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	0 jeni
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	0 jeni
Lainnya	0 jeni

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN**A. Konflik SARA**

Kasus konflik pada tahun ini
Kasus konflik SARA pada tahun ini
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/k
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara
Jumlah korban luka akibat konflik Sara
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara
Jumlah janda akibat konflik Sara
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum

B. Perkelahian

Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa

Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum

C. Pencurian

Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan setempat
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum

E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang

F. Pemakaian Miras dan Narkoba

Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras
Jumlah kasus mabuk akibat Miras
Jumlah pengedar Narkoba
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum

G. Prostitusi

Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat
Lokalisasi prostitusi
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti jomban, dll)
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi

H. Pembunuhan

Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat
Jumlah kasus bunuh diri
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum

I. Penculikan

Jumlah kasus penculikan

Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat

Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat

Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum

J. Kejahatan seksual

Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini

Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat

Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks

K. Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah gelandangan

Jumlah pengemis jalanan

Jumlah anak jalanan dan terlantar

Jumlah manusia lanjut usia terlantar

Jumlah orang gila/stress/cacat mental

Jumlah orang cacat fisik

Jumlah orang kelainan kulit

Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan

Jumlah rumah dan kawasan kumuh

Jumlah panti jompo

Jumlah panti asuhan anak

Jumlah rumah singgah anak jalanan

Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota

Jumlah penghuni bantaran sungai

Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api

Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya

Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif

Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun

Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun

Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun

Jumlah janda

Jumlah duda

Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat

Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat

Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang

Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga

Jumlah penduduk eks NAPI

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan

Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor
 Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan
 Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan
 Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih
 Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus
 Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh
 Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk
 Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri
 Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami
 Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak
 Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua
 Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan
 Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan
 Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan
 Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini
 Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat
 Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun huku

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling
 Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat
 Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda
 Jumlah anggota Hansip dan Linmas
 Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda
 Buku anggota Hansip dan Linmas
 Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta
 Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah
 Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara
 Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara
 Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika
 Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika
 Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya
 Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya
 Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri
 Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi
 Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi
 Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan

Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerin tingkat atasnya
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UU 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan
Jumlah Wajib Pajak
Target PBB
Realisasi PBB
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan
Jumlah kasus pungutan liar
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar

C. Partisipasi Politik

1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa

Penentuan Sekretaris Desa

Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun

Masa jabatan Kepala Desa

Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan

4. Pemilihan BPD

Jumlah anggota BPD

Penentuan anggota BPD

Pimpinan BPD

Pemilikan kantor/ruang kerja BPD

Anggaran untuk BPD

Produk keputusan BPD tahun ini

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Dasar hukum keberadaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/LKD

Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK

Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan

Pemilihan pengurus LKD/LKK

Pemilihan pengurus organisasi anggota

LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,

Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya

Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK

Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK

Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK

Alokasi anggaran untuk LKD/LKK

Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya

Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK

Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD

Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK

Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK

Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, terdusun dan lingkungan

Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan

Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan

Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan

Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan

Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembe Forum Musrenbang Partisipatif

Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di Kelurahan

Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat Desa

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel

Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)

Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)

Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi desa/kelurahan

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak hasil Musrenbang

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil

Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk desa/kelurahan atau kabupaten/kota

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sesuai ketentuan dalam APB-Desa

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam

Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat

Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan

Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat

Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pambangunan sudah ada

Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya.

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara

Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/k

Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan

Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh

Ada tidaknya dana sehat

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian

Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan

Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi

Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan lingkungan lainnya

4. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan

Adat istiadat dalam kelahiran anak

Adat istiadat dalam upacara kematian

Adat istiadat dalam pengelolaan hutan

Adat istiadat dalam tanah pertanian

Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai

Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga

Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam

Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya

Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar

5. Sikap Dan Mental Masyarakat

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan

Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar

Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah

Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah

Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal

Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga

Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga

Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga

Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecah kena kasus pungutan liar, pe sejenisnya.

Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya

Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan ter proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan

Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan

Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri

Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kel kepentingan lain

Etos Kerja Penduduk

Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas

Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasar

Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan

Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan

Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain

Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari

Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/ko

Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya

Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak

Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan baha saat kelaparan dan kekeringan

Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat re pangan/kelaparan/gagal panen

Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu

Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah

Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan

Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan

Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sek

Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kuran kesulitan yang dihadapi masyarakat

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK

Jumlah kegiatan

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. Posyandu

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

2. Kelompok Tani/Nelayan

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

3. Rukun Tetangga (RT)

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

4. Rukun Warga (RW)

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

5. LKMD/LPM/Sebutan Lain

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

7. Karang Taruna

Kepengurusan

Buku Administrasi

Jumlah kegiatan

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan

Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan**

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini

Sumber Anggaran

APBD Kabupaten/Kota

Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Pemerintah Provinsi

Bantuan Pemerintah Pusat

Pendapatan Asli Desa

Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi Dana Desa

Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan

Jumlah Belanja Aparatur/pegawai

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD

Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat

Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa

Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupat

Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat

Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan disampaikan kepada kepala desa/lurah

Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan diselesaikan kepala desa/lurah

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Gedung Kantor

Jumlah ruang kerja

Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya

Listrik

Air bersih

Telepon

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik

Jumlah meja

Jumlah kursi

Jumlah almari arsip

Komputer

Mesin fax

Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa

1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Buku Data Peraturan Desa

Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah

Buku Administrasi Kependudukan

Buku Data Inventaris

Buku Data Aparat

Buku Data Tanah Kas Desa

Buku Administrasi Pajak dan Retribusi

Buku Data Tanah

Buku Laporan Pengaduan Masyarakat

Buku Agenda Ekspedisi

Buku Profil Desa dan Kelurahan

Buku Data Induk Penduduk

Buku Data Mutasi Penduduk

Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan

Buku Registrasi Pelayanan Penduduk

Buku Data Penduduk Sementara
 Buku Anggaran Penerimaan
 Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan
 Buku Kas Umum
 Buku Kas Pembantu Penerimaan
 Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan
 Buku Data Lembaga Kemasyarakatan

2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD

Gedung Kantor
 Jumlah ruang kerja
 Balai BPD
 Listrik
 Air bersih
 Telepon

2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik
 Jumlah meja
 Jumlah kursi
 Jumlah almari arsip
 Komputer
 Mesin fax

2.B. Administrasi BPD

Buku-buku administrasi kegiatan BPD
 Buku Buku Administrasi Keanggotaan
 Buku kegiatan BPD
 Buku himpunan peraturan desa
 Buku Lainnya

3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN

Gedung kantor atau Balai Pertemuan
 Alat tulis kantor
 Barang inventaris
 Buku administrasi
 Jenis kegiatan
 Jumlah pengurus
 Jumlah ruang kerja

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan
 Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan
 Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
 Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDes serta BPD
 Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan per masing

Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN

Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing

2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan

Pedoman bantuan keuangan dari provinsi

Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat besar kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan bers

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan

Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk ke desa dan kelurahan

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan

Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing

Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa

Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa

Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepala desa dan lurah.

Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat besar kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa

Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan bersumber dari kabupaten/kota

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan

Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan

Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah Desa/Kelurahan dan BPD

Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat besar kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan
 Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan
 Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggara pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing
 Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan
 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan
 Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa
 Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
 Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah lembaga kemasyarakatan
 Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dan kelurahan
 Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.
 Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga
 Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan
 Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat
 Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya
 Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

KOTA BANJARBARU, 31 Desember 2021
 KOMET
 Kecamatan BANJARBARU UTARA
 Kota KOTA BANJARBARU

NOR AKBAR, S.Pi
 Lurah

Tembusan :

1. Camat BANJARBARU UTARA
2. Walikota KOTA BANJARBARU
3. Arsip